

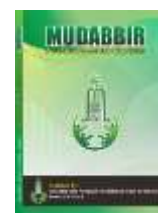


JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Analisis Transformasi Implementasi Kurikulum KTSP dan Merdeka dalam Upaya Peningkatan Kemandirian dan Mutu Pembelajaran di Sekolah

Syafti Alfhiza Damanik¹, Widya Vani Sitepu², Lastris Yetti Sitompul³,
Setia T. Sitohang⁴, Moraita Gultom⁵, Tanty Novelia Tarigan⁶,
Christa Voni Roulina Sinaga⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Email: syaftialfhiza@gmail.com¹, vaniw075@gmail.com², lastrisitompul13@gmail.com³,
setiatriskisitohang@gmail.com⁴, moraitagultom@gmail.com⁵, tanty8844@gmail.com⁶,
christaunimed@gmail.com⁷

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 dalam persoalan kemandirian sekolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dari pengumpulan data melalui studi kepustakaan, data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara kritis efektivitas implementasi kedua kurikulum dalam konteks tantangan struktural dan kultural yang dihadapi satuan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kurikulum yang telah dilakukan adalah upaya merespons terhadap tuntutan zaman dan krisis pembelajaran. Namun demikian, implemtasi kurikulum belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan pendidikan jika tidak disertai penguatan sumber daya manusia, kepemimpinan sekolah, serta dukungan sistemik dari pemerintah dan masyarakat. dari kurikulum KTSP ke Kurikulum Merdeka membawa paradigma baru yang menekankan pada fleksibilitas, diferensiasi, dan penguatan karakter peserta didik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan aktor pendidikan di tingkat mikro. Tulisan ini menawarkan kontribusi konseptual berupa paradigma bahwa transformasi pendidikan yang berdampak hanya dapat terwujud melalui sinergi antara desain kurikulum yang adaptif dan pemberdayaan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kurikulum, Paradigma Pembelajaran, Mutu Pendidikan

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Education Unit Level Curriculum (KTSP) and the 2013 Curriculum in the issue of school independence. The type of research used is qualitative from data collection through literature study, the data is analyzed descriptively-analytically to critically describe the effectiveness of the implementation of the two curricula in the context of structural and cultural challenges faced by educational units. The results of the analysis show that the implementation of the curriculum that has been carried out is an effort to respond to the demands of the times and the learning crisis. However, curriculum implementation is not fully able to answer the complexity of educational problems if it is not accompanied by strengthening human resources, school leadership, and systemic support from the government and society. from the KTSP curriculum to the Merdeka Curriculum brings a new paradigm that emphasizes flexibility, differentiation, and strengthening the character of students, but its success depends on the readiness of educational actors at the micro level. This paper offers a conceptual contribution in the form of a paradigm that impactful educational transformation can only be realized through the synergy between adaptive curriculum design and the empowerment of the entire educational ecosystem.

Keywords: Curriculum; Learning Paradigm; Education Quality

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kurikulum, baik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maupun Kurikulum Merdeka, mencerminkan dinamika kompleks di tingkat satuan pendidikan di Indonesia (Pakpahan et al., 2023). Secara umum, perbedaan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan, serta budaya manajerial sekolah menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum (Anriani et al., 2025). Dalam konteks KTSP, meskipun telah memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri sesuai kebutuhan dan potensi lokal, kenyataannya tidak semua sekolah memiliki kapasitas sumber daya dan kepemimpinan yang memadai untuk melaksanakannya secara optimal. Banyak guru mengalami kesulitan dalam menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara mandiri, sementara kepala sekolah dan tim kurikulum kerap tidak dibekali kemampuan manajerial yang kuat dalam mengelola kurikulum berbasis otonomi (Fadil et al., 2024). Akibatnya, implementasi KTSP justru memperlebar ketimpangan mutu antarwilayah dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kualitas pembelajaran (Setiawan & Ahla, 2023).

Tantangan implementasi semakin kompleks saat memasuki era Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk merespons krisis pembelajaran pascapandemi COVID-19 dan untuk mendorong fleksibilitas serta diferensiasi dalam proses pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, tidak semua sekolah memiliki infrastruktur digital yang memadai, jaringan internet yang stabil, maupun pelatihan guru yang relevan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek dan asesmen formatif (Nuraeni et al., 2020). Guru di daerah tertinggal seringkali menghadapi kendala

dalam memahami struktur baru kurikulum seperti Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Hambatan ini memperlihatkan bahwa transformasi kurikulum menuntut kesiapan sistemik, tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dari aspek kapasitas dan literasi digital para pendidik (Sitorus, 2024).

Secara kultural, perubahan kurikulum juga menghadapi resistensi di lapangan. Pola pembelajaran yang masih didominasi oleh metode ceramah dan penilaian berbasis kognitif menyulitkan guru dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan berbasis pada minat serta kebutuhan peserta didik. Rendahnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan juga menjadi kendala dalam mengembangkan ekosistem belajar yang kolaboratif (Rusdian AB et al., 2023). Terutama dalam pelaksanaan P5, dukungan sosial menjadi krusial karena proyek ini menasar penguatan karakter, gotong royong, dan kesadaran kebangsaan siswa. Tanpa sinergi antara sekolah dan masyarakat, muatan nilai-nilai karakter dalam Kurikulum Merdeka berisiko menjadi simbolik dan tidak terinternalisasi secara efektif (Hosaini et al., 2024).

Penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai persoalan implementasi kurikulum. Misalnya, studi yang dilakukan oleh (Erwin Akib et al., 2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan KTSP di daerah pinggiran sering kali mengalami stagnasi karena lemahnya dukungan struktural dan pelatihan guru. Sementara itu, studi oleh (Nisa, 2023) menekankan bahwa Kurikulum Merdeka belum optimal, selain itu juga penelitian oleh (Zuhri et al., 2024) dilaksanakan karena minimnya pemahaman konseptual guru serta kesenjangan dalam literasi teknologi. Kajian-kajian tersebut memperkuat temuan bahwa keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada kapasitas pelaksana di tingkat sekolah dan sistem dukungan yang tersedia (Kearney & Graczyk, 2020).

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika pelaksanaan KTSP dan Kurikulum Merdeka dalam konteks peningkatan kemandirian sekolah dan mutu pembelajaran di Indonesia. Penulisan ini menelaah bagaimana kedua kurikulum tersebut diimplementasikan di berbagai satuan pendidikan, serta mengidentifikasi hambatan struktural, kultural, dan teknis yang memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selain itu, artikel ini juga bertujuan memberikan masukan konseptual bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dalam merancang strategi kurikulum yang inklusif, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan abad ke-21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber tertulis, meliputi artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, buku, serta informasi yang bersumber dari website resmi yang relevan dengan kebijakan mutu pembelajaran di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan pemilahan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Tahapan analisis data mencakup reduksi data (menyaring informasi yang relevan), penyajian data (mengorganisasi informasi dalam bentuk narasi atau tabel), serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data yang telah dikaji. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari literatur dengan praktik pembelajaran aktual yang telah diterapkan di berbagai satuan pendidikan. Proses triangulasi ini memberikan validasi terhadap temuan serta memperkuat interpretasi peneliti terhadap dinamika kebijakan mutu pembelajaran di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum KTSP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia (Prasetyo & Rahman, 2023). KTSP pertama kali diberlakukan secara nasional pada tahun 2006 sebagai penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. Didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 dan 23 Tahun 2006, kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan bagi sekolah dalam menyusun materi dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan potensi peserta didik, kondisi sekolah, serta karakteristik lokal. Landasan filosofis KTSP berakar pada pemikiran konstruktivisme, bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, sedangkan secara yuridis didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara teoritis, kurikulum ini menekankan pendekatan kompetensi yang berorientasi pada hasil belajar yang dapat diukur secara objektif (Ristanti et al., 2020).

Salah satu ciri utama KTSP adalah sifatnya yang berbasis kompetensi, memungkinkan peserta didik mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Kurikulum ini juga bercirikan desentralistik, di mana setiap sekolah memiliki otonomi dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakter peserta didik. Hal ini membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat, komite sekolah, dan pemerintah daerah dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, KTSP bersifat fleksibel dan kontekstual, memungkinkan adaptasi terhadap kondisi geografis,

sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Dalam praktiknya, karakteristik ini mendorong terwujudnya pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat (Rusita Purnamasari & Purnomo, 2021).

Kurikulum KTSP sendiri memberikan kerangka dasar yang cukup komprehensif bagi sekolah untuk menyusun kurikulum secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Komponen utamanya yakni tujuan pendidikan satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender akademik, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirancang untuk memberi arah yang jelas namun tetap fleksibel. Mata pelajaran dan beban belajar ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan, tetapi penyusunan silabus dan RPP diserahkan kepada guru agar dapat dikembangkan secara kontekstual dan relevan. Dengan demikian, KTSP menegaskan pentingnya desentralisasi kurikulum yang memberikan ruang otonomi kepada sekolah untuk berinovasi sesuai realitas sosial, budaya, dan geografisnya (Suherman, 2021).

Dalam praktik penyusunannya, KTSP melibatkan tim pengembang kurikulum sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan komite sekolah sebagai representasi masyarakat. Proses ini menjamin adanya partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan dalam mendefinisikan arah dan isi pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan seperti relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan integrasi menjadi dasar agar kurikulum tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan spesifik peserta didik. Namun, implementasi prinsip ini menuntut kompetensi teknis yang tinggi dari pendidik dan manajerial sekolah yang kuat. Tantangan yang sering muncul adalah kurangnya pelatihan yang memadai dalam pengembangan kurikulum dan minimnya akses terhadap sumber daya pendidikan berkualitas, khususnya di wilayah yang belum berkembang.

Pelaksanaan KTSP menempatkan guru sebagai aktor kunci dalam keseluruhan proses pendidikan. Guru tidak hanya menjadi pelaksana kurikulum, tetapi juga bertanggung jawab merancang dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Dalam konteks ini, guru dituntut untuk menerapkan strategi pembelajaran aktif, kontekstual, dan partisipatif yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa. Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi serta pemanfaatan potensi lingkungan lokal menjadi sarana penting dalam menumbuhkan kemandirian belajar. Namun, peran multifungsi guru juga membawa beban administratif yang tidak ringan, terutama bagi sekolah dengan jumlah tenaga pendidik yang terbatas. Kesiapan guru dalam mengelola berbagai tanggung jawab inilah yang sering menjadi titik lemah dalam penerapan KTSP secara efektif (Wahyuni, 2022).

Dari sisi penilaian, KTSP menawarkan pendekatan yang progresif melalui penerapan penilaian autentik yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar. Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif, serta mencakup instrumen portofolio untuk mengukur perkembangan kompetensi siswa secara berkelanjutan. Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) juga dimaksudkan agar standar pencapaian dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kapasitas

sekolah. Namun, dalam implementasinya, pemahaman guru terhadap asesmen autentik masih sangat beragam, dan tidak jarang terjadi reduksi makna penilaian menjadi sekadar angka capaian. Maka, keberhasilan KTSP sangat bergantung pada kapasitas guru dalam mengintegrasikan kurikulum, strategi pembelajaran, dan penilaian secara utuh demi meningkatkan mutu pembelajaran secara menyeluruh (Fatmawati, 2021).

Secara keseluruhan, KTSP membawa sejumlah kelebihan, seperti mendorong kebebasan sekolah dalam menentukan arah pendidikan dan mengakomodasi kearifan lokal. Namun, kelemahan utamanya terletak pada kesenjangan kapasitas antar sekolah dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum, serta beban administratif bagi guru. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya (KBK) dan sesudahnya (Kurikulum 2013), KTSP menunjukkan transisi dari pendekatan berpusat pada guru menuju berpusat pada peserta didik. Implikasi KTSP terhadap dunia pendidikan cukup signifikan, terutama dalam meningkatkan peran aktif guru sebagai fasilitator pembelajaran dan mendorong keterlibatan masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi KTSP sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian, kajian terhadap KTSP tetap relevan untuk menilai dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia dan sebagai pijakan dalam pengembangan kurikulum masa depan.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan terbaru yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai respons terhadap krisis pembelajaran yang diperparah oleh pandemi COVID-19 (Koesyono Efendi & I Wayan Suastra, 2023). Kurikulum ini berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh dan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat masing-masing siswa. Didasarkan pada Permendikbudristek No. 12 Tahun 2022 dan kebijakan Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka hadir menggantikan model kurikulum sebelumnya yang dinilai terlalu padat konten dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan daerah maupun karakteristik peserta didik. Tujuan utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan kontekstual dengan memberi ruang bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional secara mandiri (Rajabalee & Santally, 2021).

Filosofi yang melandasi Kurikulum Merdeka adalah humanisme progresif, sebagaimana dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia secara utuh. Kurikulum ini dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibilitas dalam pelaksanaan, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Prinsip diferensiasi menjadi elemen penting, memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan setiap siswa. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari kurikulum sebelumnya yang cenderung seragam dan terpusat, menuju pendekatan yang lebih personal, reflektif, dan partisipatif (Mulyani et al., 2023).

Secara praktik, fleksibilitas dalam struktur Kurikulum Merdeka tercermin dalam desain pembelajaran yang tidak lagi terikat pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI/KD), melainkan berorientasi pada *Capaian Pembelajaran (CP)* yang disesuaikan dengan fase perkembangan peserta didik. Hal ini memberi ruang bagi guru untuk mengatur tempo dan kedalaman materi sesuai kebutuhan kelas. Dalam pelaksanaannya, guru dapat menyusun *Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)* sebagai peta jalan pembelajaran yang adaptif dan tidak kaku. *Modul Ajar* disusun sebagai instrumen pedagogis yang mengintegrasikan strategi belajar, asesmen, dan diferensiasi pembelajaran. Praktik ini memberi keleluasaan kepada guru untuk merancang kegiatan belajar yang kontekstual, bermakna, dan menyentuh aspek kognitif maupun afektif peserta didik, tanpa harus terikat pada silabus nasional yang bersifat seragam (Jusuf & Sobari, 2024).

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi komponen yang membedakan Kurikulum Merdeka dari kurikulum sebelumnya, karena secara eksplisit mengarusutamakan pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kecakapan abad ke-21 (Maruti et al., 2023). Dalam praktik di sekolah, P5 dilaksanakan melalui proyek lintas disiplin yang berangkat dari isu-isu lokal hingga global, seperti perubahan iklim, literasi digital, hingga budaya lokal. Siswa tidak hanya diajak mengidentifikasi masalah, tetapi juga berkolaborasi mencari solusi, menyampaikan gagasan, dan melakukan aksi nyata. Guru berperan sebagai pendamping yang memfasilitasi proses pembelajaran aktif dan reflektif. Proyek ini, pada praktiknya, memperkuat kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan gotong royong siswa dimensi yang menjadi inti dari Profil Pelajar Pancasila (Aryzona et al., 2023).

Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, transformasi peran guru dari instruktur menjadi fasilitator sangat menonjol. Guru tidak hanya menyampaikan materi, melainkan juga memfasilitasi eksplorasi, mengatur ruang belajar yang fleksibel, serta melakukan asesmen secara terus-menerus untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Platform Merdeka Mengajar hadir sebagai alat bantu digital yang menyediakan referensi Modul Ajar, pelatihan mandiri, serta asesmen diagnostik awal pembelajaran (Adiwardana et al., 2025). Dalam praktiknya, guru dituntut untuk melakukan refleksi berkala terhadap proses pembelajaran dan hasil asesmen formatif, agar dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma pembelajaran dari *teaching-based* menjadi *learning-centered* yang menuntut kompetensi pedagogis dan digital yang lebih tinggi dari tenaga pendidik (Putri et al., 2024).

Namun demikian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih menghadapi sejumlah tantangan nyata di lapangan. Kesiapan guru, terutama di daerah dengan keterbatasan akses teknologi, masih menjadi kendala signifikan. Banyak sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mengalami kesulitan dalam mengakses sumber belajar digital dan melakukan pelatihan mandiri. Selain itu, resistensi dari sebagian orang tua dan masyarakat terhadap metode pembelajaran baru menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak cukup hanya pada tataran kebijakan, tetapi harus diiringi dengan

sosialisasi dan pendampingan yang intensif. Ketimpangan kapasitas antarsekolah dan antarwilayah berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan, apabila tidak diatasi melalui kebijakan afirmatif yang tepat sasaran. Oleh karena itu, praktik implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan kolaborasi lintas pihak secara berkelanjutan: pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat.

Refleksi Implementasi Kurikulum: Dari KTSP ke Merdeka Belajar

Perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum Merdeka harus dipahami sebagai respons strategis terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan cepat berubah. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, dunia pendidikan dituntut untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga adaptif, kritis, kolaboratif, dan kreatif. KTSP, meskipun memiliki semangat desentralisasi, pada praktiknya belum mampu menjawab tantangan tersebut secara menyeluruh. Ketika masyarakat mengalami transformasi dalam pola hidup, teknologi, dan cara berinteraksi, kurikulum justru cenderung stagnan dan tidak responsif terhadap kebutuhan lokal maupun perkembangan global. Maka, kurikulum harus dirancang bukan hanya untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membentuk kepribadian, kemandirian, dan daya saing peserta didik (Hartoyo et al., 2023).

Lebih jauh, kurikulum yang kaku dan seragam seperti pada masa KTSP telah terbukti memperlebar jurang ketimpangan kualitas antarwilayah. Sekolah-sekolah di daerah tertinggal sering kesulitan memenuhi standar nasional yang ditetapkan secara sentralistik, sehingga menciptakan kesenjangan dalam pencapaian hasil belajar. Dalam konteks inilah, Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan fleksibel, memungkinkan satuan pendidikan untuk menyesuaikan strategi dan konten pembelajaran dengan karakteristik wilayah dan peserta didik. Hal ini sejalan dengan semangat kemandirian sekolah, yaitu memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menentukan arah pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan lokalnya, dengan tetap berlandaskan pada standar nasional pendidikan (Setyorini et al., 2023).

Di sisi lain, masyarakat kini tidak lagi cukup dengan model pendidikan yang menekankan aspek kognitif semata. Dunia kerja dan kehidupan sosial menuntut kompetensi sosial-emosional, literasi digital, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. KTSP yang berbasis kompetensi dasar masih memusatkan perhatian pada capaian akademik, sehingga melemahkan pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum Merdeka berupaya memperbaiki hal ini melalui penguatan dimensi karakter yang terangkum dalam Profil Pelajar Pancasila. Ini merupakan bentuk adaptasi terhadap harapan masyarakat modern yang menginginkan lulusan pendidikan mampu menjadi warga negara global yang berkarakter, serta berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (Nurdiyanto et al., 2024).

Akhirnya, kebutuhan akan perubahan kurikulum juga muncul dari kesadaran bahwa pendidikan harus menjadi ruang emansipasi dan pemberdayaan. Sekolah tidak

boleh lagi menjadi sekadar tempat reproduksi pengetahuan, melainkan agen transformasi sosial yang mampu membentuk peserta didik menjadi subjek aktif dalam membangun dirinya dan lingkungannya. Untuk itu, kemandirian sekolah harus difasilitasi oleh kerangka kurikulum yang memberi ruang inovasi, refleksi, dan kolaborasi. Kurikulum Merdeka memberikan peluang tersebut dengan menekankan pada otonomi profesional guru, partisipasi komunitas, dan pembelajaran kontekstual yang bermakna. Perubahan ini bukan semata-mata teknokratis, tetapi merupakan upaya membangun sistem pendidikan yang lebih adil, relevan, dan berkelanjutan di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang (Mustakim et al., 2024).

Fokus utama dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi pada beban konten yang padat, melainkan pada penguatan proses belajar yang bermakna dan kontekstual. Materi yang diajarkan difokuskan pada esensi kompetensi, bukan pada keluasan isi. Ini sejalan dengan kritik terhadap kurikulum sebelumnya yang cenderung mengutamakan hafalan dan pencapaian angka. Dengan pendekatan yang lebih ringkas, pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka memberikan ruang refleksi, eksplorasi, dan kreativitas. Penekanan diberikan pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan abad ke-21 dan dunia kerja yang dinamis (Pakpahan et al., 2023).

Di sisi lain, Kurikulum Merdeka memberikan penekanan kuat pada pendidikan karakter melalui penguatan nilai-nilai Pancasila. Profil Pelajar Pancasila menjadi kerangka ideologis dan pedagogis yang mengarahkan proses pendidikan, dengan enam dimensi utama yang membentuk karakter bangsa. Ini bukan sekadar tambahan nilai moral dalam pembelajaran, melainkan fondasi dari keseluruhan orientasi pendidikan nasional. Dalam konteks ini, pembelajaran bukan hanya tentang menjadi pintar, tetapi menjadi manusia Indonesia yang utuh: religius, mandiri, kolaboratif, kritis, kreatif, dan global. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya membentuk pelajar yang cakap secara akademik, tetapi juga berakar dalam nilai kebangsaan dan kemanusiaan (Minsih et al., 2023).

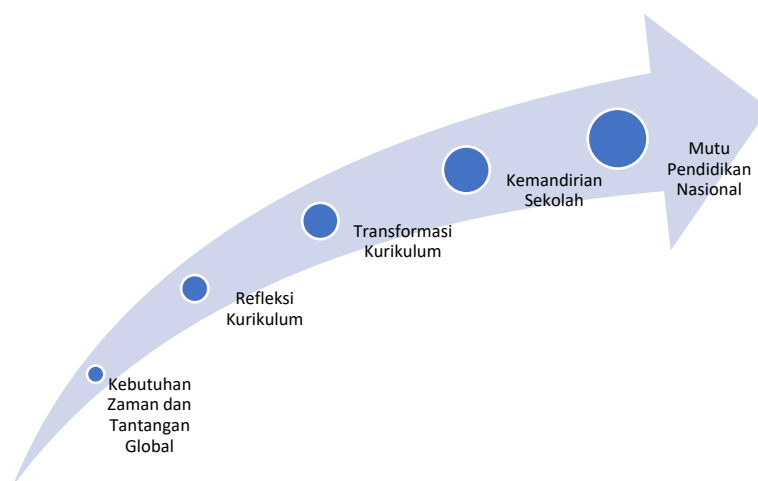
Harapan besar dari perubahan ini adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berpihak pada siswa dan kontekstual dengan realitas lokal. Kurikulum Merdeka tidak memaksa sekolah untuk mengikuti struktur tunggal dari pusat, melainkan mendorong keberagaman model pembelajaran berdasarkan kebutuhan nyata di daerah masing-masing. Dengan adanya keleluasaan dalam menyusun ATP, Modul Ajar, dan Proyek P5, sekolah diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Ini diharapkan dapat mendorong inovasi pendidikan yang tidak seragam, tetapi tetap dalam kerangka nasional yang visioner dan inklusif (Nurhayati et al., 2022).

Namun, perubahan arah kurikulum ini tidak akan bermakna tanpa perubahan paradigma dalam praktik pendidikan. Harapan bahwa kurikulum ini akan memerdekakan peserta didik dari tekanan akademik hanya akan terwujud jika seluruh ekosistem pendidikan guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah

membangun pemahaman dan komitmen yang sama. Guru harus memosisikan diri sebagai fasilitator proses belajar, bukan pengajar yang hanya mengejar penyelesaian materi. Pemerintah harus memastikan dukungan pelatihan dan infrastruktur, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Dengan kata lain, keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat tergantung pada kesiapan dan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Strategi Membangun Kemandirian Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Sebagai respons terhadap pergeseran paradigma dari Kurikulum KTSP ke Kurikulum Merdeka, peningkatan kemandirian sekolah dan mutu pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada pendekatan sistemik dan berlapis. Hal ini menuntut integrasi antara penguatan struktur internal sekolah, revitalisasi ekosistem pendukung, serta reposisi aktor pendidikan sebagai subjek perubahan. Mengacu pada teori *learning organization* (Malik & Garg, 2020), sekolah semestinya menjadi entitas yang terus belajar, beradaptasi, dan bertransformasi berdasarkan refleksi terhadap tantangan zaman. Perubahan kurikulum tidak akan berdampak optimal jika sekolah tetap dilihat sebagai objek kebijakan, bukan sebagai aktor strategis yang membentuk makna dan arah pembelajarannya sendiri.



Gambar: Paradigma Kurikulum untuk Kemandirian dan Mutu Pendidikan

Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan sekolah menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian yang sejati. Berdasarkan pendekatan *instructional leadership* (Hallinger et al., 2020), kepala sekolah tidak cukup hanya mengelola aspek administratif, tetapi harus memimpin proses pembelajaran dengan visi yang transformatif. Ini mencakup kemampuan membina komunitas belajar, menciptakan iklim inovatif, serta mendorong kolaborasi antar guru. Tata kelola sekolah yang partisipatif dan transparan juga sejalan dengan prinsip *good governance* dalam pendidikan, di mana setiap warga sekolah berperan aktif dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengembangan kurikulum yang kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik (Rosser, 2023).

Kedua, peran guru sebagai subjek profesional dalam kurikulum harus diperkuat. Teori *teacher agency* (Molla & Nolan, 2020) menekankan pentingnya memberi ruang bagi guru untuk bertindak secara reflektif, kritis, dan kreatif dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pelatihan guru tidak boleh sekadar teknis, tetapi juga filosofis dan pedagogis, agar guru memiliki kepekaan terhadap keragaman peserta didik dan mampu menerapkan strategi diferensiasi secara autentik. Kehadiran komunitas praktisi guru juga menjadi mekanisme penting dalam membangun kapasitas profesional secara kolektif, sejalan dengan pendekatan *professional learning community* yang terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan (Admiraal et al., 2021).

Ketiga, kemandirian sekolah tidak akan bertahan tanpa dukungan dari lingkungan eksternal yang kuat. Berdasarkan perspektif *ecological system theory* (El Zaatar & Maalouf, 2022), pendidikan berkualitas lahir dari interaksi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas aktor pendidikan sangat krusial dalam menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Pemerintah daerah harus memainkan peran sebagai fasilitator strategis, bukan sekadar regulator, dengan menyediakan dukungan kebijakan, pendanaan, dan infrastruktur yang mendukung inovasi lokal. Ini juga mencerminkan prinsip *responsible decentralization*, yaitu otonomi yang disertai akuntabilitas dan keadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan (Hilmy Nurfaizan Abdul Matin et al., 2025).

Keempat, evaluasi mutu pendidikan perlu bergeser dari pendekatan birokratik ke model yang lebih formatif, reflektif, dan kontekstual. Dalam pendekatan *holistic assessment* (Ramachandran et al., 2023), penilaian harus melihat proses belajar sebagai bagian dari pengembangan diri, bukan sekadar pengukuran kognitif. Indikator mutu harus mencakup sejauh mana sekolah mampu membangun budaya belajar yang kritis, kolaboratif, dan inklusif. Evaluasi seperti ini mendorong kesadaran bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai ujian atau akreditasi administratif, tetapi juga dari bagaimana peserta didik merasa dihargai potensinya dan menjadi agen pembelajar aktif dalam konteksnya masing-masing.

Kelima, seluruh strategi peningkatan mutu dan kemandirian sekolah harus didukung oleh reformasi struktural di tingkat nasional. Merujuk pada prinsip *equity in education* (Ainscow, 2020), negara harus memastikan pemerataan akses terhadap teknologi, pelatihan, dan sumber daya pembelajaran untuk menghindari perlebaran ketimpangan antarwilayah. Selain itu, mekanisme akuntabilitas publik berbasis partisipasi perlu dikembangkan agar kebijakan pendidikan tidak top-down, tetapi lahir dari dialog dan kebutuhan riil satuan pendidikan. Pendekatan *continuous improvement* juga penting diterapkan, di mana evaluasi bukan sebagai kontrol, melainkan sebagai sarana perbaikan terus-menerus (Kahloun & Ayachi-Ghannouchi, 2019).

Akhirnya, keberhasilan Kurikulum Merdeka dalam membangun pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan akan sangat bergantung pada sejauh mana seluruh pemangku kepentingan memaknai transformasi ini sebagai tanggung jawab

kolektif. Sekolah yang mandiri tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga visi, kompetensi, dan dukungan sistemik untuk mengelola pembelajaran secara bermakna. Oleh karena itu, reformasi kurikulum perlu dilihat sebagai gerakan bersama untuk membentuk ekosistem pendidikan yang tidak sekadar responsif terhadap perubahan, tetapi juga proaktif membentuk masa depan bangsa yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing global.

KESIMPULAN

Implementasi kurikulum sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia masih menyisakan sejumlah tantangan struktural dan kultural yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Perubahan kurikulum, dari KTSP hingga Kurikulum Merdeka, merupakan respons terhadap tuntutan zaman, perubahan sosial global, serta krisis pembelajaran yang terjadi, terutama pasca pandemi. Meskipun perubahan ini membawa paradigma baru dalam pendidikan, upaya menuju kemandirian sekolah dan peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dicapai hanya melalui revisi kurikulum semata. Keberhasilan transformasi pendidikan sangat bergantung pada penguatan sumber daya manusia, terutama guru sebagai fasilitator pembelajaran, kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional, serta dukungan sistemik dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa ekosistem pendidikan yang solid dan berdaya adaptif, implementasi kurikulum yang progresif akan sulit mencapai hasil yang diharapkan secara merata. Dengan demikian, tulisan ini memberikan kontribusi konseptual dalam membangun paradigma baru pendidikan, yakni bahwa kemandirian sekolah dan mutu pendidikan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui sinergi kurikulum yang adaptif dan penguatan aktor pendidikan di semua lini. Paradigma ini perlu dijadikan dasar dalam setiap kebijakan dan praktik pendidikan ke depan, agar transformasi pendidikan nasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi berdampak nyata bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

REFERENSI

- Adiwardana, M. R., Herwin, & Indah, F. (2025). Pancasila Student Profile Strengthening Project: Self-Efficacy and Its Influence on Primary School Students' Motivation to Engage in Citizenship Issues. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 8(3), 424–433. <https://doi.org/10.23887/jisd.v8i3.70732>
- Admiraal, W., Schenke, W., De Jong, L., Emmelot, Y., & Sligte, H. (2021). Schools as professional learning communities: what can schools do to support professional development of their teachers? *Professional Development in Education*, 47(4), 684–698. <https://doi.org/10.1080/19415257.2019.1665573>
- Ainscow, M. (2020). Inclusion and equity in education: Making sense of global challenges. *PROSPECTS*, 49(3–4), 123–134. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09506-w>
- Anriani, T., Ningsih, N. S., Sari, P. S., Cahyaningsih, E., & Santosa, S. (2025). Perubahan Kurikulum di Indonesia: Dinamika Implementasi Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(2), 956–965. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i2.1204>
- Aryzona, E. F., Asrin, A., & Syazali, M. (2023). Analisis Kompetensi Guru dan Desain Pembelajaran dalam Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Sesuai Kurikulum Merdeka SD Negeri 1 Jantuk Tahun Pelajaran 2022-2023. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 424–432. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1156>
- El Zaatari, W., & Maalouf, I. (2022). How the Bronfenbrenner Bio-ecological System Theory Explains the Development of Students' Sense of Belonging to School? *Sage Open*, 12(4). <https://doi.org/10.1177/21582440221134089>
- Erwin Akib, Muhammad Erwinto Imran, Saiyidah Mahtari, Muhammad Rifqi Mahmud, Anggy Giri Prawiyogy, Irfan Supriatna, & MT. Hartono Ikhsan. (2020). Study on Implementation of Integrated Curriculum in Indonesia. *IJORER : International Journal of Recent Educational Research*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.46245/ijorer.v1i1.24>
- Fadil, K., Ikhtiono, G., & Nurhalimah, N. (2024). Perbedaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(1), 224–238. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.472>
- Fatmawati, I. (2021). Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran. *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 1(1), 20–37. <https://doi.org/10.62825/revorma.v1i1.4>
- Hallinger, P., Gümüş, S., & Bellibaş, M. Ş. (2020). “Are principals instructional leaders yet?” A science map of the knowledge base on instructional leadership, 1940–2018. *Scientometrics*, 122(3), 1629–1650. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03360-5>
- Hartoyo, A., Melati, R., & Martono, M. (2023). DAMPAK PERUBAHAN KURIKULUM MERDEKA DAN KESIAPAN TENAGA PENDIDIK TERHADAP PENYESUAIAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 412–428.

<https://doi.org/10.31932/jpdp.v9i2.2773>

- Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, Cecep Darmawan, Prayoga Bestari, & Syaifullah. (2025). Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Integralistik*, 36(1). <https://doi.org/10.15294/j473yx66>
- Hosaini, H., Qomar, M., Zaenul Fitri, A., Akhyak, A., & Kojin, K. (2024). Innovative Learning Strategies for Islamic Religious Education Based on Merdeka Belajar Curriculum in Vocational High Schools. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(3), 966. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i3.587>
- Jusuf, H., & Sobari, A. (2024). Pembelajaran Paradigma Baru Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 5(2), 185–194. <https://doi.org/10.31599/1298zk08>
- Kahloun, F., & Ayachi-Ghannouchi, S. (2019). A prototype for continuous improvement of processes and their results in the field of higher education. *Business Process Management Journal*, 26(1), 168–190. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-05-2018-0148>
- Kearney, C. A., & Graczyk, P. A. (2020). A Multidimensional, Multi-tiered System of Supports Model to Promote School Attendance and Address School Absenteeism. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 23(3), 316–337. <https://doi.org/10.1007/s10567-020-00317-1>
- Koesyono Efendi, F., & I Wayan Suastra. (2023). Implementation of The Independent Curriculum in Elementary Schools. *International Journal of Contemporary Studies in Education (IJ-CSE)*, 2(2), 149–153. <https://doi.org/10.56855/ijcse.v2i2.363>
- Malik, P., & Garg, P. (2020). Learning organization and work engagement: the mediating role of employee resilience. *The International Journal of Human Resource Management*, 31(8), 1071–1094. <https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1396549>
- Maruti, E. S., Malawi, I., Hanif, M., Budyartati, S., Huda, N., Kusuma, W., & Khoironi, M. (2023). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Jenjang Sekolah Dasar. *Abdimas Mandalika*, 2(2), 85. <https://doi.org/10.31764/am.v2i2.13098>
- Minsih, M., Fuadi, D., & Rohmah, N. D. (2023). Character Education Through an Independent Curriculum. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(1), 597–602. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.2812>
- Molla, T., & Nolan, A. (2020). Teacher agency and professional practice. *Teachers and Teaching*, 26(1), 67–87. <https://doi.org/10.1080/13540602.2020.1740196>
- Mulyani, S., Nurmeta, I. K., & Maula, L. H. (2023). Analisis Implementasi Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(4), 1638–1645. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i4.5515>
- Mustakim, M., Suastra, I. W., & Lasmawan, I. W. (2024). THE INDEPENDENT CURRICULUM IN EDUCATIONAL THEORY REVIEW: CHALLENGES AND SOLUTIONS. *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(2), 2480. <https://doi.org/10.33394/realita.v9i2.12391>
- Nisa, K. (2023). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum: Antara KBK, KTSP, K13 Dan

- Kurikulum Merdeka. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v2i2.21603>
- Nuraeni, Y., MS, Z., & Boeriswati, E. (2020). A Case Study of Curriculum Implementation and K-13 Challenges in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(8), 14. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v2i1.2263>
- Nurdiyanto, N., Musyfiq, A., Karman, K., & Nursobah, A. (2024). Independent Curriculum Development Strategy in Islamic Religious Education: Conceptual Studies of Building Character and Nationality. *Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(1), 65–80. <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v13i1.12072>
- Nurhayati, P., Emilzoli, M., & Fu'adiah, D. (2022). PENINGKATAN KETERAMPILAN PENYUSUNAN MODUL AJAR DAN MODUL PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA KURIKULUM MERDEKA PADA GURU MADRASAH IBTIDAIYAH. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5). <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10047>
- Pakpahan, H. M., Suherni, S., Pujiati, L., & Girsang, R. (2023). Effectiveness of Indonesian Education Curriculum Reform on the Quality of Processes in Learning. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(1), 564–569. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i1.3930>
- Prasetyo, O., & Rahman, A. (2023). Analisis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Mata Pelajaran Sejarah Sebagai Perbandingan Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.20527/pakis.v3i1.7831>
- Putri, V. N., Sundari, P. D., Hufri, H., & Sari, S. Y. (2024). Physics Teaching Materials Based on The Creative Problem-Solving Model with Concept Maps: The Effect on Students' Learning Outcomes. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(4), 1907–1915. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v10i4.5805>
- Rajabalee, Y. B., & Santally, M. I. (2021). Learner satisfaction, engagement and performances in an online module: Implications for institutional e-learning policy. *Education and Information Technologies*, 26(3), 2623–2656. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10375-1>
- Ramachandran, R., Jacobs, M. S., Lavine, A. S., & Levis-Fitzgerald, M. (2023). Holistic Assessment Framework for General Education Program Review. *The Journal of General Education*, 70(1–2), 85–110. <https://doi.org/10.5325/jgeneeduc.70.1-2.0085>
- Ristanti, O., Suri, A., Choirrudin, C., & Dinanti, L. K. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 152. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.2826>
- Rosser, A. (2023). Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution-Level Governance. *Journal of Contemporary Asia*, 53(1), 53–78. <https://doi.org/10.1080/00472336.2021.2010120>
- Rusdian AB, Nathanael Sitanggang, & Muhammad Joharis Lubis. (2023). Problems Of Higher Education, Curriculum and Education In Indonesia. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4).

<https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.344>

- Rusita Purnamasari, & Purnomo, H. (2021). IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA PEMBELAJARAN TEMATIK-INTEGRATIF DI SEKOLAH DASAR. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 7(01), 163–174. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v7i01.169>
- Setiawan, A., & Ahla, S. S. F. (2023). Innovating For The Future: A Critical Analysis of Curriculum Development Models KBK, KBM, KTSP, K13, and Merdeka Curriculum. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3), 2188. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2191>
- Setyorini, R., Martono, M., & Hartoyo, A. (2023). PENGARUH KEBIJAKAN PERUBAHAN KURIKULUM TERHADAP PEMBELAJARAN DI SEKOLAH. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHAHA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 383–398. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v9i2.2770>
- Sitorus, F. R. (2024). The Challenges of Implementing the Independent Curriculum in Elementary Schools. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 6(1), 16–23. <https://doi.org/10.52005/belaindika.v6i1.155>
- Suherman, A. (2021). Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Menengah Kejuruan. *Inovasi Kurikulum*, 6(2), 74–91. <https://doi.org/10.17509/jik.v6i2.35702>
- Wahyuni, S. (2022). Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6 SE-Articles), 13404–13408. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.12696>
- Zuhri, S., Suwindia, I. G., & Ari Winangun, I. M. (2024). Literasi digital dan kecakapan abad ke-21: analisis komprehensif dari literatur terkini. *Education and Social Sciences Review*, 5(2), 149. <https://doi.org/10.29210/07essr500300>